

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad AH, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm : 72.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Fihafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm : 48.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm : 17.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Fetanase, Ruben Ahmad, 2000, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, hlm : 185.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, 2007, (Dalam Sadjjono : *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*), Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hlm : 51.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 185.
- Barda Nawawi Arief (I), *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. 2001, hlm. 73-74
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm : 1128.
- Dudu Duswara Machmudin, 2001, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm : 23.
- E.St Harahap, dkk. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka. Tahun 2007, hal 751
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi ED.2*, Jakarata, Sinar Grafika,
- HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 2008, Dalam : Sadjjono; *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hlm : 58.
- Herbert L. Packer, 1969, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, USA Californian, hlm : 12.
- Horton, Paul. B & Chester L. Hunt. 1991. *Sociology. 6 th ed. (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga

Indoharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm : 94.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV.Diadit Media, Jakarta, 2009

Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Unibraw, Malang, hlm : 52

Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muhamad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

Muhari Agus Santosa, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malaysia, hlm : 8.

Nashriana, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Kajian Syariah Universitas Sriwijaya, Palembang.

Peter Muhammad marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 35

Prayitno Imam Santosa dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVIII NO. 321, IKAHI, Jakarta, 2012,

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007. Hal.17

RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice Procedurs and Issues*, West Publishing, USA, hlm : 347.

Salim, HS., 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm : 73

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98.

#### **B. Artikel, Disertasi, Tesis dan Skripsi:**

Hartanta Tarigan, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Pirmawan Sitorus. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Pidato sambutan Jaksa Agung Ri “*Rekonseptualisasi Politik Kriminal dan perspektif Kriminologi dan Penegakkan Hukum*” disampaikan pada Simposium Nasional MAHUPIKI, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Tahun XXVII No. 330 edisi Mei ,2013

Supatmo Eka Iskandar, Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009. Diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian>.

Soeprapto, Riyadi. *Teori Interaksi Simbolik. Averroes Community -Membangun Wacana Kritis Rakyat*. (online). (<http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik>, 2007. diakses pada tanggal 18 Januari 2012).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang undang No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



### **D. WEBSITE**

[http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan - uang-pengganti-koruptor](http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-koruptor).

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/05/21315951/Penyelamatan.Uang.Negara.dalam.Penyelesaian.Korupsi.oleh.Kejagung.Meningkat.di.2014>.

<http://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada tanggal 14 Maret 2015 jam 15.15 wib

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-uang-pengganti.html>, diakses, Minggu 12  
Februari 2012

